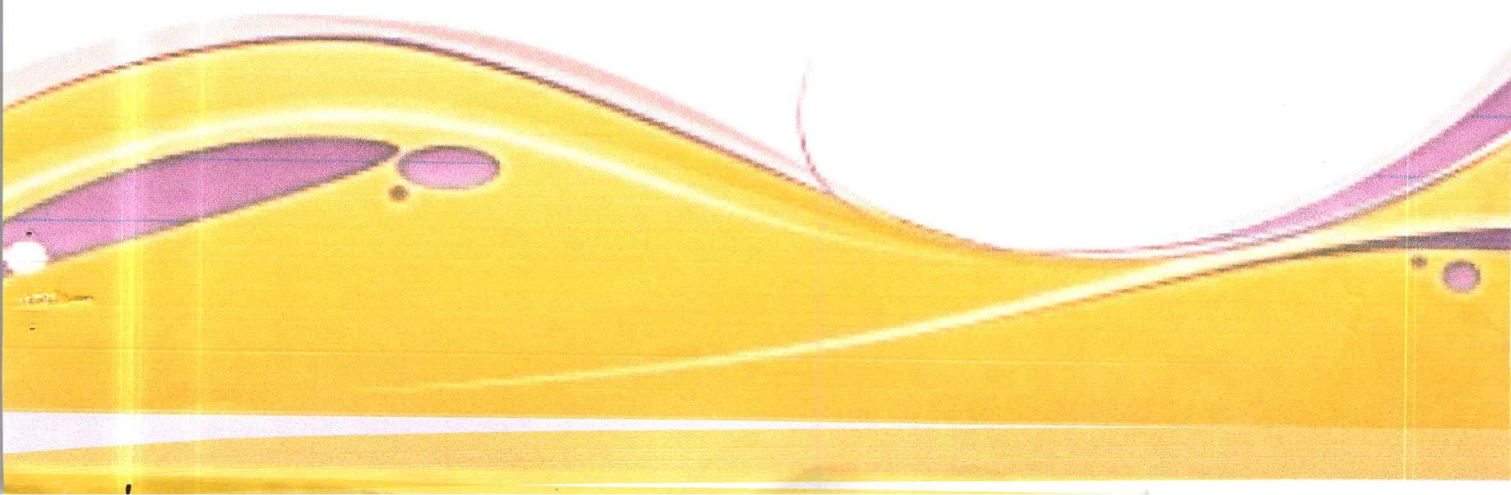


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2021
KANWIL DJKN BALI DAN NUSATENGGARA**



PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusatenggara dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja dimaksud sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusatenggara pada Tahun 2021. Penyusunan LAKIN Kantor Wilayah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada umumnya dan DJKN pada khususnya, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* Kanwil DJKN Balinusra dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kepala Kanwil DJKN Balinusra Tahun 2021. Dalam LAKIN 2021 dilakukan berdasarkan hasil capaian IKU seluruh kinerja Kanwil DJKN Balinusra sesuai dengan Peta Strategis Kanwil Balinusra Tahun 2021.

Harapan kami LAKIN Tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban, sebagaimana harapan pengguna layanan dalam peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dengan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) telah mencapai pada angka 112,52 %.

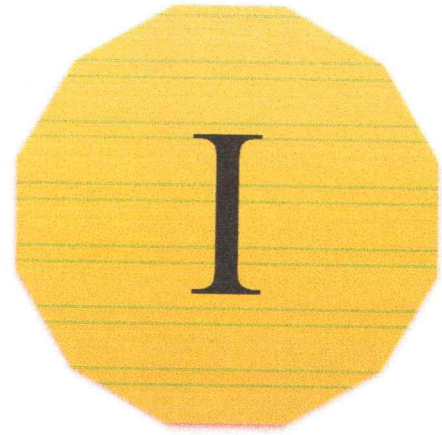
Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan laporan akuntabilitas kinerja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Denpasar, 24 Januari 2022

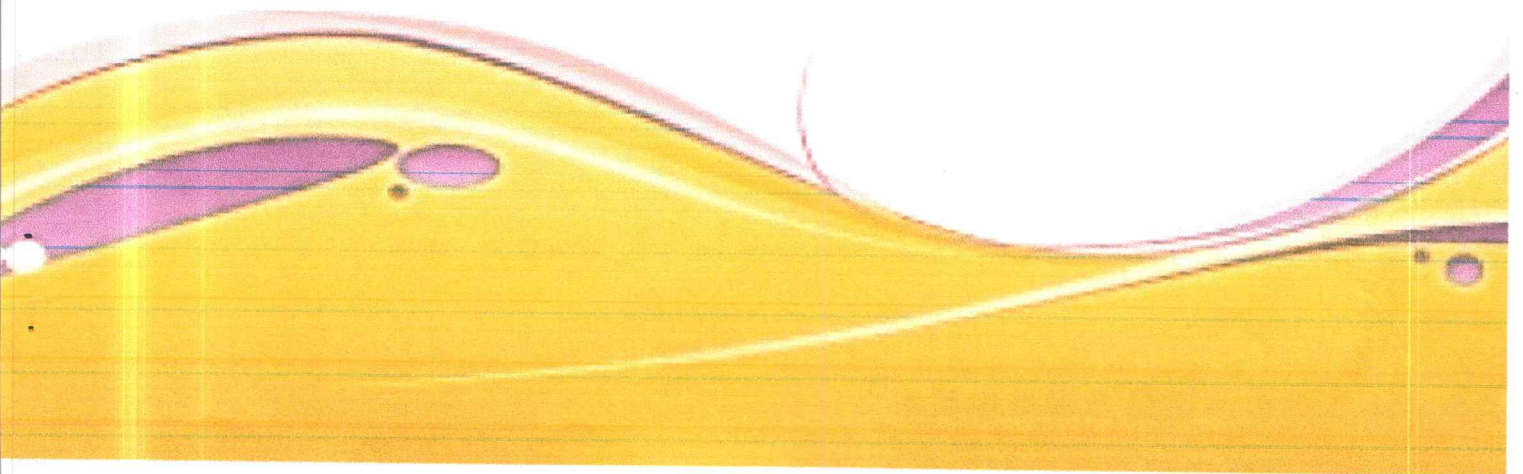
Kepala Kantor



Anugrah Komara



PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat didalam Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor : 263/PMK.01/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, melakukan bimbingan teknis, melakukan pengendalian, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk mampu menghadirkan sikap yang prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien yang harus selaras dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Laporan Kinerja Tahun 2021 disusun sebagai cerminan dari salah satu prinsip akuntabilitas yang merupakan salah satu perwujudan dari prinsip *good governance*.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Selain melaksanakan tugas yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud Kanwil mempunyai fungsi antara lain :

Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) yang dapat di rinci sebagai berikut :

- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara, Lelang, Umum dan Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi,
- b. Pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian Piutang Negara ;

- c. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang Kekayaan Negara, penilaian, Piutang Negara dan Lelang;

b. Struktur Organisasi

- a. Berdasarkan PMK nomor 263/PMK.01/2016 tentang perubahan atas PMK nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, Kanwil DJKN terdiri dari:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
 - c. Bidang Penilaian;
 - d. Bidang Piutang Negara ;
 - e. Bidang Lelang;
 - f. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun wilayah kerja Kanwil DJKN Balinusra meliputi 3 provinsi yaitu :

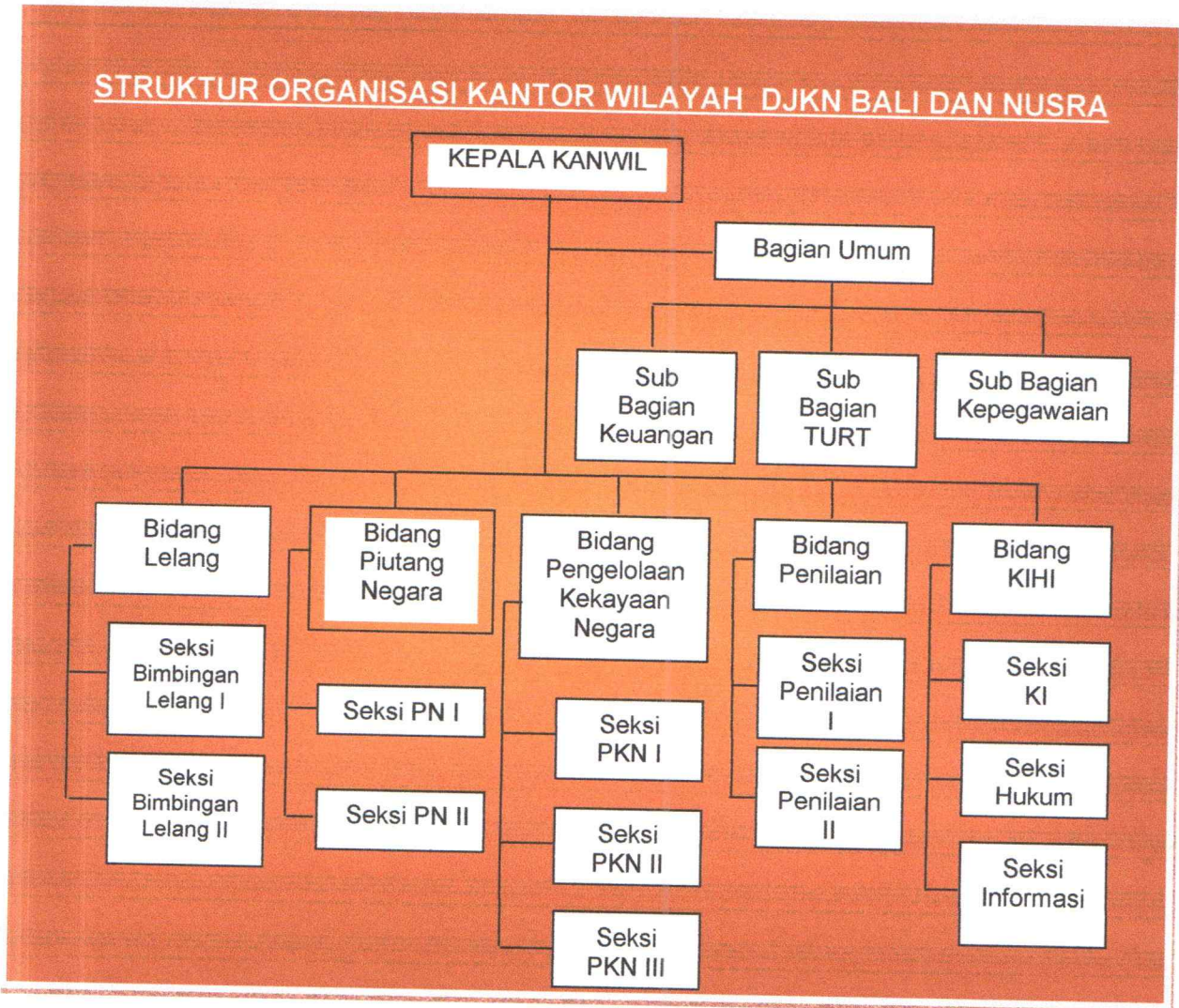
1. Propinsi Bali,
2. Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan
3. Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara membawahi 5 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu :

1. KPKNL Denpasar;
2. KPKNL Singaraja;
3. KPKNL Mataram;
4. KPKNL Bima dan
5. KPKNL Kupang.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat di gambarkan seperti tabel di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSRA



Sumber daya manusia yang ada di wilayah Kanwil DJKN Bali & Nusa sampai dengan akhir tahun 2021 untuk mendukung tugas dan fungsi DJKN sebanyak 210 pegawai masing-masing terdiri dari pegawai Kanwil sebanyak 47 pegawai, KPKNL Denpasar sebanyak 42 pegawai, KPKNL Singaraja sebanyak 35 pegawai, KPKNL Mataram sebanyak 28 pegawai, KPKNL Bima sebanyak 27 pegawai dan KPKNL Kupang sebanyak 31 pegawai dengan komposisi per Golongan, Jabatan dan Pendidikan sebagai berikut :

Tabel : 1.1 (SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali & Nusa per Golongan)

SATKER/GOLONGAN	GOL.IV	GOL.III	GOL II	Jumlah
KANTOR WILAYAH	16	24	7	47
KPKNL DENPASAR	5	28	9	42
KPKNL SINGARAJA	3	24	8	35
KPKNL MATARAM	2	18	8	28
KPKNL BIMA	1	18	8	27
KPKNL KUPANG	1	20	10	31

Tabel : 1.2 (SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali & Nusra per jabatan)

	JABATAN				
	ESELON	ESELON	Kelompok Pejabat Fungsional	ESELON	PELAKSANA
	II	III		IV	
KANTOR WILAYAH	1	6	3	15	22
KPKNL DENPASAR	0	1	10	5	26
KPKNL SINGARAJA	0	1	8	5	21
KPKNL MATARAM	0	1	7	4	16
KPKNL BIMA	0	1	5	4	16
KPKNL KUPANG	0	1	6	5	19

Tabel : 1.3 (SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali & Nusra sesuai pendidikan)

	PENDIDIKAN						
	S3	S2	S1	D3	D1	SMU	SMP
KANTOR WILAYAH	3	15	16	4	3	4	2
KPKNL DENPASAR	-	4	22	8	5	2	1
KPKNL SINGARAJA	-	2	14	12	-	7	-
KPKNL MATARAM	-	5	14	2	-	5	2
KPKNL BIMA	-	3	10	5	-	2	2
KPKNL KUPANG	-	1	16	6	4	4	-

C. Peran Strategis

Sebagai unit eselon II di Lingkungan DJKN, Kanwil DJKN Balinusra, diberi tanggung jawab untuk mengawal dan mewujudkan **visi** dan **misi** DJKN yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- 3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

- 5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Guna mengimplementasikan optimalisasi tercapainya tujuan tersebut maka peran Kanwil DJKN Balinusra dalam membangun citra baik bagi *stakeholders* sangat diharapkan.

1. Bagian Umum

Peran Bagian Umum dalam pelaksanaan tugas-tugas kanwil adalah terwujudnya urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan Kanwil yang tertib dan lancar.

2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran Bidang PKN dalam pelaksanaan tugas-tugas kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kekayaan Negara, serta pengkoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada KPKNL di lingkungan Kanwil secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3. Bidang Penilaian

Peran Bidang Penilaian dalam pelaksanaan tugas-tugas kanwil adalah Terwujudnya bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian yang cepat, tepat, dan cermat di lingkungan Kanwil.

4. Bidang Piutang Negara

Peran Bidang Piutang Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas kanwil adalah Terwujudnya bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas

usul restrukturisasi piutang negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, permintaan keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, serta penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara secara baik sehingga tercapai pengurusan Piutang Negara yang optimal.

5 Bidang Lelang

Peran Bidang Lelang dalam pelaksanaan tugas-tugas kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang di lingkungan Kanwil yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

6 Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (KIHI)

Peran Bidang KIHI dalam pelaksanaan tugas-tugas kanwil adalah mendukung terwujudnya bahan bimbingan dan bahan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan implementasi pengelolaan kinerja, pemantauan dan penjaminan kualitas pelaksanaan prosedur, koordinasi dan implementasi manajemen risiko pada Kanwil, koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat, penanganan perkara, pemberian pendapat hukum (legal opinion), dan pelaksanaan bantuan hukum, serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan

implementasi sistem aplikasi, penyajian pelayanan informasi, koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi dan hubungan masyarakat yang cepat, tepat dan cermat di lingkungan Kanwil.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja 2021 ini kami sajikan dengan sistematika laporan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyaikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguaraikan ikhtisar/ringkasan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Keinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi.

B. Realisasi Anggaran

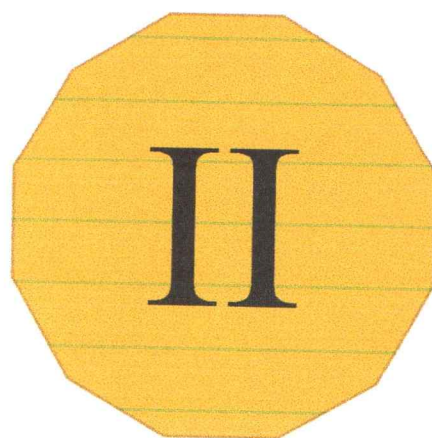
Sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meingkatkan kinerjanya.

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meingkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Perjajian Kinerja



PERENCANAAN KINERJA



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kanwil DJKN Balinusra berusaha memberikan pelayanan yang terbaik di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang, Penilaian yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat berpedoman pada visi dan Misi DJKN. Adapun visi DJKN adalah **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"**. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mencapai Visi dimaksud Kanwil DJKN Bali Nusra pada Tahun 2021 telah menetapkan Target Kinerja dengan menandatangani Kontrak Kinerja yang tertuang dalam 10 Sasaran Strategis dan 20 Indeks Kinerja Utama (IKU)

B. Visi Dan Arah Kebijakan

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan jajarannya sebagai institusi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan para stakeholder dalam hal pengelolaan kekayaan negara. Disamping itu juga terus berupaya melaksanakan pengurusan piutang negara yang berasal dari kementerian/lembaga yang pengurusannya diserahkan ke PUPN/DJKN. Dalam hal pelayanan lelang, terus diupayakan penggalian potensi lelang eksekusi maupun non eksekusi sehingga lelang dapat dikenal dan dijadikan sebagai salah satu sarana transaksi jual beli yang diminati oleh masyarakat.

2. Pelayanan Secara Professional Dan Bertanggungjawab

Pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang secara professional dan bertanggungjawab mengandung arti bahwa Kantor Wilayah dan jajarannya (KPKNL) dalam melakukan pelayanannya menjunjung etika

professional yaitu dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

3. Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat.

Kanwil beserta jajarannya berusaha memberikan layanan terbaik sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai cita-cita dan arah dari pengelolaan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk di dalamnya pengurusan piutang dan optimalisasi layanan lelang.

C. Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan

Visi yang telah dihadirkan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam 6 (enam) misi yaitu:

- Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
- Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Realisasi Kanwil dan KPKNL dalam melaksanakan misi di atas adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan negara;
- Mengamankan kekayaan negara melalui pembangunan sistem komputerisasi, pembuatan bukti kepemilikan dan monitoring kekayaan negara;
- Menyediakan informasi jumlah dan nilai riil kekayaan negara;
- Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan bersaing sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;
- Menjadi *revenue center* dengan memaksimalkan PNBPN, hasil dari pemanfaatan

bnm, bea lelang, dan biaya administrasi penagihan piutang negara.

Implementasi terhadap misi yang akan dicapai telah ditetapkan dalam pola dan tujuan. Terdapat 8 (delapan) tujuan yang hendak dicapai oleh Kanwil beserta jajarannya yang meliputi:

- Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
- Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;
- Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, dan monitoring investasi Pemerintah;
- Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti;
- Peningkatan pelayanan penilaian;
- Optimalisasi pengurusan piutang Negara;
- Peningkatan pelayanan lelang;
- Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Upaya Kanwil untuk mencapai tujuan tersebut kemudian disusun dalam sasaran strategis yang akan ditempuh dalam suatu periode tertentu. Sifatnya spesifik, dapat dinilai dalam angka, dan berorientasi pada jangka waktu tertentu (1 tahun), yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
2. Pelayanan public yang prima;
3. Kepatuhan yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara;
4. Pelayanan pelayanan yang berkualitas;
5. Tata Kelola Kekayaan Negara yang optimal;
6. Tata Kelola Pengurusan piutang Negara dan lelang yang akuntabel;
7. Edukasi yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
9. SDM yang kompetitif;
10. Organisasi yang fit-for-porpuse;
11. Sistem manajemen informasi yang andal;
12. Pengelolaan anggaran yang optimal.

Secara keseluruhan Program Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Tahun 2020-2024

D. Penetapan Kinerja

Untuk merealisasikan visi, maka DJKN menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Penetapan kinerja Kanwil Bali Nusra Tahun 2021 didasarkan pada peta strategis *Kemenkeu Two* dan berpedoman pada visi dan misi yang diterjemahkan dalam empat perspektif yaitu :

1. *Stakeholder perspective (25%)*

Perspektif yang berkaitan dengan *stakeholder* Kantor Wilayah untuk mengetahui kinerja yang paling utama yang terdiri dari :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang optimal	1a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1c-CP	Persentase Penurunan nilai outstanding piutang negara (saldo PNDS s/d 2017)	100%

2. *Customer perspective (15%)*

Perspektif yang berorientasi kepada pemenuhan tingkat kepuasan pelanggan pada Kanwil yang terdiri dari satker, penyerah piutang dan penanggung hutang, serta pemohon lelang dan pembeli lelang, dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-N	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	88,00
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Angile, Efektif dan Efisien	3a-CP	Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Kanwil dan KPKNL	4,68

3. *Internal Proces perspective (30%)*

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam internal organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada *customer* dan *stakeholder* yang meliputi :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif	4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%
		4b-CP	Persentase implementasi Evaluasi kinerja BMN (partopolio aset)	100%
		4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif	5a-CP	Persentase efektifitas penyelesaian BKPN	100%
		5b-Cp	Persentase produktifitas Lelang	35%

		5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-convent	92%
		5d-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90%
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
		7b-CP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	97%

4. *Learning and Growth perspective (30%)*

Merupakan sumber daya intern Kantor Wilayah yang dimiliki sebagai modal seluruh jajaran untu terus belajar memperbaiki diri dan terus tumbuh dalam melaksanakan kegiatan organisasi yang meliputi :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
8	SDM yang kompeten	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
9	Organisasi yang fit-for-purpose			75
		9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75
10	Pengelolaan Keuangan yang optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Balinusra tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data bahwa capaian nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Balinusra tahun 2021 sebesar 112,52%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Balinusra

Perspektif	2020		2021	
	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
Stakeholder	40	37,37	25	29,43
Customer	-	-	15	16,31
Internal Process	30	33,65	30	34,03
Learning & Growth	30	34,39	30	33,62
TOTAL NKO		105,41		112,52

Catatan Status NKO :

$100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi

$80 \leq x < 100$ = belum memenuhi ekspektasi

$x < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

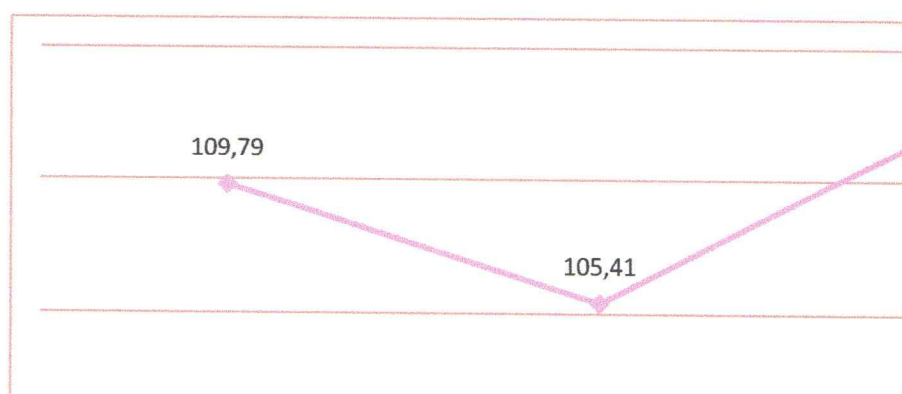
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021 Kanwil DJKN Balinusra telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Selama tahun

2021, Kanwil DJKN Balinusra memiliki 20 IKU dengan berstatus semua IKU hijau. Hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kanwil DJKN Balinusra tahun 2021 dapat dilihat berikut :

Grafik 3.2



Grafik 3.2
Tren Kinerja NKO Kanwil DJKN Balinusra



Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)				29,43%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				117,74%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	79,59%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	133,77%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan nilai outstanding piutang negara	P/M	100%	112,41%	112,41%	hijau
	Customer Perspective(15%)				16,31%	

2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				116,64%	
2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	P/H	88,00	98,55	112,37%	hijau
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	162,34%	120,24%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien				100,85%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4,68	4,72	100,85%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)				32,75%	
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				110,31%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	103,30%	103,30%	hijau
4b-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	110,09%	110,09%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	4,91%	120,00%	hijau
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				113,63%	
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKN	P/M	100%	107,03%	107,03%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35%	48,94%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	98,90%	107,50%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	12,5%	3,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif				104,52%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90,00	94,07	104,52%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif				108,19%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaankekayaan negara	P/M	85%	96,29%	113,28%	hijau
7b-CP	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M	97%	100,00%	103,09%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)				34,03%	
8	SDM yang Kompeten				120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose				120,00%	

9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	75	95,41	120,00%	hijau
9b-N	Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja	P/M	75	93,54	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal				100,26%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,75%	100,26%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					112,52	Hijau

Sebagaimana tertera pada tabel diatas, pada tahun 2021 Kanwil DJKN Balinusra berhasil memperoleh NKO 112,52% dimana capaian dengan nilai tersebut menandakan kinerja Kanwil DJKN Balinusra pada tahun 2021 berhasil memenuhi ekspektasi organisasi.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

1. Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2. Pengurusan piutang negara; dan
3. Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

1. Seluruh BMN, KNL (Kekayaan Negara Lainnya), dan KND (Kekayaan Negara Dipisahkan) telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
2. Pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Pengelolaan kekayaan Negara yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Balinusra meliputi pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain. Pengelolaan Negara dikatakan optimal apabila seluruh aset dapat diutilisasi, dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan aset Negara, dan dapat meningkatkan PNBP.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Balinusra mengidentifikasi 3 (tiga) IKU sebagai berikut:

Tabel 3.4
SS Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
I	Pengelolaan kekayaan Negara dan Lelang yang optimal			117,74%
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	79,59%	120,00%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	133,77%	120,00%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai outstanding piutang negara	100%	112,41%	112,41%

a. (1a-CP) IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

IKU ini merupakan IKU yang baru ditetapkan tahun 2020, IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN yang ada di satuan kerja dengan standar biaya dan standar kebutuhan.

Isu Utama

IKU tercapai namun capaian NUP pada KPKNL masih standard

Implikasi

Tingkat kesesuaian menunjukkan tren penurunan, dikhawatirkan kuantitas penyampaian form 100%, tetapi tingkat kesesuaian masih rendah

Akar Masalah

Target NUP sudah ditetapkan sehingga tidak ada pilihan

Tindakan yang telah dilaksanakan

Kanwil DJKN Balinusra telah melaksanakan koordinasi mingguan secara informal dengan Kasi PKN KPKNL

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melanjutkan validasi hasil verifikasi pelaksanaan perhitungan SBSK dari KPKNL.
2. Melakukan koordinasi dengan KPKNL agar membuat rencana kerja survei penghitungan SBSK dan melaporkan satker yang sudah dan belum memenuhi target SBSK 62%.
3. Melakukan monitoring tiap bulan terhadap capaian penyelesaian perhitungan SBSK dan melakukan evaluasi terhadap hasil SBSK-nya.
4. Usulan revisi target NUP K/L untuk SBSK.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian IKU

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Target	Realisasi
2021	62%	79,59%
2020	55%	75,60%

b. (1b-CP) Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Isu Utama

1. Target akan dipastikan meningkat
2. Rendahnya kualitas BKPN
3. Masih tingginya jumlah pelaksanaan lelang TAP, dikarenakan daya beli masyarakat yang belum stabil sehingga berdampak terhadap perekonomian
4. Pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung walaupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dilonggarkan oleh Pemerintah tetapi kegiatan perekonomian masih belum pulih

Implikasi

1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan debitur dan proses pengurusan Piutang Negara.
2. Rendahnya kualitas BKPN mengakibatkan BKPN tidak tertagih
3. Target akan dipastikan meningkat, sehingga potensi PNBPN harus digali lebih dalam

Akar Masalah

1. Rendahnya kualitas BKPN yang diterima dari K/L karena umur piutang yang sudah lama, tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur tidak diketahui, dokumen yang tidak lengkap
2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan pembayaran oleh debitur selain itu berdampak pada proses pengurusan seperti penyampaian Surat Paksa, penilaian barang jaminan, pemeriksaan maupun penelitian lapangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan pembinaan terhadap KPKNL
2. Melakukan koordinasi dengan PNKNL mengenai bimbingan dan pembinaan di KPKNL (Rapat Bimbingan Teknis).

3. Melakukan One on One Meeting dengan KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Balinusra.
4. Menerbitkan Surat Paksa
5. Melaksanakan rapat PUPN
6. Menetapkan nilai limit barang jaminan yang akan dijual lelang.
7. Melaksanakan monitoring Crash Program Keringanan Utang (CPKU)
8. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dengan PL II dan Balai Lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN Balinusra
9. Penyampaian apresiasi kepada PT. Pegadaian (Persero) dengan telah tercapainya PNBP Lelang Pegadaian
10. Rapat Bimbingan Teknis dengan KPKNL mengenai Pembuatan/penyusunan serta penatausahaan risalah lelang

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melanjutkan validasi hasil verifikasi pelaksanaan perhitungan SBSK dari KPKNL.
2. Melakukan koordinasi dengan KPKNL agar membuat rencana kerja survei penghitungan SBSK dan melaporkan satker yang sudah dan belum memenuhi target SBSK 62%.
3. Melakukan monitoring tiap bulan terhadap capaian penyelesaian perhitungan SBSK dan melakukan evaluasi terhadap hasil SBSK-nya.
4. Usulan revisi target NUP K/L untuk SBSK

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Target	Realisasi
2021	100%	133,77%
2020	100%	77,60%

c. (1c-CP) IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara

Isu Utama

1. Target Penurunan Outstanding Piutang Negara sebesar Rp. 9.110.000.000,00. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan

outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 atau sebelumnya.

2. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir

Implikasi

Penurunan kemampuan debitur dan proses pengurusan Piutang Negara

Akar Masalah

1. Rendahnya kualitas BKPN yang diterima dari K/L karena umur piutang yang sudah lama, tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur tidak diketahui, dokumen yang tidak lengkap
2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan pembayaran oleh debitur selain itu berdampak pada proses pengurusan seperti penyampaian Surat Paksa, penilaian barang jaminan, pemeriksaan maupun penelitian lapangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan pembinaan terhadap KPKNL melalui surat dan bimbingan teknis dalam pengurusan piutang Negara .
2. Melakukan usulan pencegahan terhadap Debitur .
3. Melakukan koordinasi dengan PNKNL mengenai bimbingan dan pembinaan di KPKNL (Rapat Bimbingan Teknis).
4. Pelantikan anggota PUPN unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Pemda.
5. Melakukan monitoring evaluasi dan akurasi basis data bidang Piutang Negara.
6. Melakukan monitoring Pengurusan Piutang Negara Debitur High Profile.
7. Mencetak dan memasang umbul-umbul, banner dan brosur.
8. Menyampaikan surat kepada semua satker tingkat Kanwil.
9. Melakukan One on One Meeting dengan KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Balinusra.
10. Menerbitkan Surat Paksa.
11. Menetapkan nilai limit barang jaminan yang akan dijual lelang.
12. Melaksanakan monitoring Crash Program Keringanan Utang (CPKU).
13. Melaksanakan rapat PUPN

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Membuat daftar BKPN potensial dengan melakukan mapping BKPN dalam rangka mencari sumber capaian One on One Meeting dengan KPKNL.
2. Melakukan bimbingan teknis ke KPKNL terkait monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL, potensi debitur besar di KPKNL

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian IKU

Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara	Target	Realisasi
2021	100%	112,41%
2020	3%	162,73%

2. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Tabel 3.8
SS . Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			116,64%
2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	88,00	98,88	112,37%
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	162,34%	120,00%

a. 2a-N Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang
Isu Utama

Capaian pada Bidang PKN selama tahun 2021 ada 9 produk hukum sesuai dengan SOP, sehingga realisasinya 100%.

Implikasi

Target kanwil secara keseluruhan tercapai, realisasi di bidang PKN juga hijau diatas 100%

Akar Masalah

1. Pembatasan mobilisasi pegawai, sedangkan berkas diperlukan pemeriksaan secara fisik
2. Surat pemberitahuan penilaian ke Satker terlambat disampaikan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Bidang PKN terus berkoordinasi dengan Bidang KIH dan dalam hal update berkas permohonan ke tautan yang sudah disediakan oleh Bidang KIH untuk mempermudah pelaksanaan pemantauan mengingat pelaksanaan WFH dan WFO yang masih diterapkan.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Menyelesaikan layanan pengelolaan kekayaan negara sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku dan mempercepat waktu layanannya.
2. Meningkatkan fungsi monitoring penyelesaian permohonan persetujuan.
3. Mencari ide-ide baru dalam mempercepat layanan atas layanan pengelolaan kekayaan Negara

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian IKU

Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	Target	Realisasi
2021	88,00	98,88
2020	87,00	98.50

b. 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Isu Utama

1. Banyaknya jumlah pelaksanaan lelang TAP, dikarenakan pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap perekonomian yang belum stabil
2. Potensi PL Kelas II berasal dari lelang kendaraan dan lukisan.

Implikasi

Ada kebijakan tidak kena pajak untuk pembelian mobil baru, sehingga lelang mobil bekas menurun karena pembeli lebih tertarik untuk membeli mobil baru, untuk lelang lukisan cukup potensial karena banyak gallery lukisan dengan peminat wisatawan luar dan dalam negeri.

Akar Masalah

Apabila tahun 2021 masih terjadi pelaksanaan lelang tetapi TAP maka kemungkinan target yang telah ditetapkan oleh kantor pusat tidak akan tercapai atau sama dengan capaian tahun sebelumnya

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dengan PL II dan Balai Lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN Balinusra
2. Penyampaian apresiasi kepada PT. Pegadaian (Persero) dengan telah tercapainya PNBPN Lelang Pegadaian
3. Rapat Bimbingan Teknis dengan KPKNL mengenai Pembuatan/penyusunan serta penatausahaan risalah lelang

4. Pelaksanaan Lelang pada saat ini dilakukan secara online dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk meminimalisir penyebaran covid 19 di wilayah Kanwil DJKN Balinusra

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Memonitor pelaksanaan lelang TAP dengan menghimbau kepada stakeholder untuk lebih mengoptimalkan pemasaran
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder
3. Melakukan Bimbingan Teknis kepada KPKNL

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi IKU Persentase Hasil Lelang

	Target		Realisasi	
	%	Rp	%	Rp
2020	100%	1.182.471.000.000,00	73,63	870.738.973.074,00
2021	100%	1.140.000.000.000,00	163,25	1.861.150.418.750,00

3. Sasaran Strategis : Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Tabel 3.11
SS Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			100,85%
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL	4,68	4,72	100,85%

3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL

Isu Utama

1. Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
2. Adanya pembatasan mobilisasi pegawai dan penugasan secara Work From Home, serta penerimaan surat yang tidak dapat berproses seperti SOP yang berjalan selama ini.

Implikasi

Jeda waktu yang terlalu jauh antara waktu pelayanan yang diterima pengguna jasa dengan pelaksanaan survei, terutama untuk pelayanan yang diterima di awal tahun

Akar Masalah

1. Pengguna jasa menuntut pelayanan tercepat

2. Pengguna jasa enggan mengisi kuesioner
3. Pengguna jasa lupa terhadap pelayanan yang pernah diterima

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Penugasan Work From Home tetap dilakukan dengan upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa (penyelesaian pekerjaan sesuai SOP).
2. Terus melakukan komunikasi dengan pihak yang mengajukan permohonan pengelolaan BMN untuk dapat melakukan tracing dokumen usulan yang diterima Satpam dan progres terakhir dari surat tersebut.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Memberikan layanan kepada stakeholder dengan berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan dan SOP layanan Pengelolaan Kekayaan Negara.
2. Meminta masukan kepada stakeholder untuk meningkatkan layanan Pengelolaan Kekayaan Negara.
3. Menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dan sinergis dengan stakeholder.

Tabel 3.12

Perbandingan IKU Kepuasan Pengguna Layanan pada Kanwil dan Kantor Pelayanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan	Target	Realisasi
2021	4,68	4,72
2020	4,67	4,71

4. Sasaran Strategis : Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tabel 3.13

SS Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif			110,31%
4a - CP	Persentase bidang tanah yang disertifikatkan	100%	103,30%	103,30%
4b - N	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset)	100 %	110,09%	110,09%
4c - CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22 %	4,91%	120%

a. (4a – CP) Persentase bidang tanah yang disertifikatkan

Isu Utama

1. Kantah mulai bergerak aktif diakhir-akhir tahun
2. Perpanjangan sertifikasi 2021 khusus Balinusra s.d. 31 Januari 2022

Implikasi

1. Target Sertifikasi 2021 tercapai diatas 100%
2. Aplikasi kemenkeu hanya mengakomodir realisasi s.d. 20 Januari 2022

.Akar Masalah

Sertifikasi BMN Bukan menjadi prioritas utama bagi Kantor Pertanahan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan kinerja dengan seluruh seksi PKN pada KPKNL dan Koordinator Sertifikasi Kantor Pertanahan dengan salah satu pokok bahasan mengenai upaya dan strategi KPKNL dalam percepatan pencapaian target IKU pada tahun 2021, bahkan hamper ditiap minggu pada Bulan Desember
2. Monev dengan masing-masing Kantor Pertanahan dan satuan kerja pemohon telah dilaksanakan

.Rekomendasi Rencana Aksi

1. Berkoordinasi dengan Direktorat BMN, Kanwil BPN, KPKNL, Kantah se wilayah Kanwil DJKN Balinusra, dan Satker yang menjadi target sertifikasi tahun 2021 sehingga mempunyai langkah kerja yang sama.
2. Memastikan target sertifikasi clean dan clear. dan dapat dilengkapi persyaratannya. Apabila ada permasalahan dan hambatan segera dilakukan penggantian target untuk menjaga pencapaian target.
3. Memonitor dan mengevaluasi progres sertifikasi secara bulanan dengan kunjungan KPKNL atau Kantor pertanahan maupun melalui WA grup Sertifikasi.
4. Meminta KPKNL agar para satkernya dapat memutakhirkan data SIMANTAP

**Tabel 3.14 (PKN)
Perbandingan Capaian IKU Tahun 2021 – 2020**

Persentase Bidang Tanah yang Disertifikatkan	Target	Realisasi
2021	1.424	1.471
2020	523	524

b. (4b – N) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset)

Isu Utama

Larangan aktifitas di tempat umum karena mewabahnya Virus Corona (Covid-19).

Implikasi

Kendala peninjauan ke lapangan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan monitoring progress pelaksanaan evaluasi kinerja BMN (Portofolio) melalui melalui aplikasi SIMAN Portofolio <http://10.10.5.53:8081/simanportofolio>
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja BMN (Portofolio) dengan KPKNL

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring progress pelaksanaan evaluasi kinerja BMN (Portofolio)
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja BMN (Portofolio)

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian IKU

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset)	Target	Realisasi
2021	100%	110,09%
2020	100%	107,82%

c. (4c – CP) Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Isu Utama

Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN.

Implikasi

Mengikuti pola saat ini, dimana nilai yang dipakai adalah mana yang lebih tinggi antara usulan penilai pada permohonan atau nilai hasil penilaian. Permasalahan timbul apabila nilai usulan di permohonan satker lebih tinggi dari nilai hasil penilaian

Akar Masalah

Satker tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memnentukan harga taksiran.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Rekapitulasi daftar kegiatan penilaian yang telah dilakukan dengan disertai nilai wajar hasil penilaian

2. Berkoordinasi secara informal dan formal melalui Nota Dinas dengan Direktorat PKNSI dan Bidang PKN Kanwil DJKN Balinusra terkait nilai persetujuan pemanfaatan maupun pemindahtanganan BMN setiap bulan.
3. Penilai memperhatikan nilai usulan dalam permohonan untuk mereview hasil penilaian.

Rekomendasi Rencana Aksi

Memberikan edukasi kepada satker saat pelaksanaan survei lapangan sehingga satker memiliki pengetahuan dasar dalam mengajukan nilai taksiran

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian IKU

Deviasi ketergunaan hasil penilaian	Target	Realisasi
2021	22%	4,91%
2020	30%	30,69%

5. Sasaran Strategis : Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tabel 3.17
SS Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			113,63%
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	107,03%	107,03%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35%	48,94%	120,00%
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	98,90%	107,50%
5d-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	12,5%	3,00%	120,00%

a. (5a-CP) Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

Isu Utama

1. Target BKPN Selesai 1.650 realisasi 1.766
2. Rendahnya kualitas BKPN

Implikasi

1. Rendahnya kualitas BKPN mengakibatkan BKPN tidak tertagih
2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan debitur dan proses pengurusan Piutang Negara

Akar Masalah

1. Rendahnya kualitas BKPN yang diterima dari K/L karena umur piutang yang sudah lama, tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur tidak diketahui, dokumen yang tidak lengkap.
2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kemampuan pembayaran oleh debitur selain itu berdampak pada proses pengurusan seperti penyampaian Surat Paksa, penilaian barang jaminan, pemeriksaan maupun penelitian lapangan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan pembinaan terhadap KPKNL melalui surat dan bimbingan teknis dalam pengurusan piutang Negara
2. Melakukan koordinasi dengan PNKNL mengenai bimbingan dan pembinaan di KPKNL (Rapat Bimbingan Teknis).
3. Melakukan One on One Meeting dengan KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Balinusra.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Membuat daftar BKPN potensial dengan melakukan mapping BKPN dalam rangka mencari sumber capaian.
2. One on One Meeting dengan KPKNL
3. Melakukan bimbingan teknis ke KPKNL terkait monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL, potensi debitur besar di KPKNL

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian IKU

Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	Target	Realisasi
2021	100%	107,03%
2020	100 %	122,63%

b. (5b-CP) Persentase produktivitas lelang

Isu Utama

Masih terdapat pelaksanaan lelang yang TAP (Tidak Ada Penawaran) dan dibatalkan oleh pemohon

Implikasi

Kurang maksimalnya capaian produktivitas lelang

Akar Masalah

Dalam pelaksanaan lelang Eksekusi UUHT Pasal 6, Kreditur mengajukan permohonan lelang sebagai salah satu strategi agar debitur segera melakukan pembayaran/pelunasan terhadap objek lelang

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Imbauan kepada stakeholder untuk mengupayakan objek lelang yang diusulkan telah free & clear.
2. Menghimbau kepada stakeholder untuk lebih optimal dalam pemasaran dan/atau menemukan peminat yang potensial sehingga objek lelang yang ditawarkan agar lelang yang dilaksanakan optimal.

Rekomendasi Rencana Aksi

Menyampaikan kepada KPKNL/PL2 untuk menghimbau pada Stakeholder agar lelang yang diusulkan free & clear, dan melakukan upaya pemasaran sebelum diusulkan lelang

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian IKU

Persentase produktivitas lelang	Target	Realisasi
2021	35%	48,94%
2020	34%	46,09%

c. (5c-CP) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Isu Utama

Semua pelaksanaan lelang telah dilaksanakan secara e-auction dan e-conventional auction

Implikasi

Sampai dengan triwulan IV capaian IKU maksimal yaitu 100%

Tindakan yang telah dilaksanakan

Menghimbau kepada stakeholder yang masih melaksanakan lelang konvensional untuk segera beralih ke lelang e-auction dan e-konvensional auction

Rekomendasi Rencana Aksi

Menghimbau kepada KPKNL untuk mewajibkan pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian IKU

Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	Target	Realisasi
2021	92%	98,90%
2020	90%	94,43%

d. (5d-CP) Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Isu Utama

1. Perbedaan data pada aplikasi SPAN dan Simponi
2. Sinkronisasi aplikasi SPAN dan Simponi yang membutuhkan waktu
3. Dibutuhkannya waktu yang tidak singkat untuk melakukan rekonsiliasi PNBPN terlebih dahulu

Implikasi

Pada saat waktu pelaporan kinerja petugas harus selalu mengecek OMSPAN apabila ada update data

Akar Masalah

Aplikasi SPAN dan Simponi yang masih memerlukan pemutakhiran lebih lanjut sehingga menyebabkan proses sinkronisasi aplikasi SPAN dan Simponi mengalami trouble atau mengalami perbedaan data dalam beberapa waktu.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Telah menyampaikan hasil rekonsiliasi PNBPN s.d. Bulan Desember 2021 pada aplikasi SPAN dan Simponi sebagai monitoring sinkronisasi data PNBPN antara aplikasi SPAN dan Simponi.

Rekomendasi Rencana Aksi

Agar pihak pengembang aplikasi dapat mengembangkan aplikasi Simponi menjadi update secara real time jika ada perbaikan rekonsiliasi PNBPN sehingga aplikasi Simponi dan SPAN dapat tersinkronisasi dengan baik

6. Sasaran Strategis : Edukasi yang Efektif

Tabel 3.21
SS Edukasi yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6	Edukasi yang Efektif			104,52%
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90,00	94,07	104,52%

6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Isu Utama

Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi adalah gabungan dari edukasi kanwil ke pengguna jasa dan bimbingan teknis kanwil ke KPKNL, targetnya 90,00

Implikasi

Bimbingan ke KPKNL dan layanan kepada pengguna layanan harus ditingkatkan

Akar Masalah

1. Pengguna jasa enggan mengisi kuesioner
2. Bidang lelang tidak melaksanakan edukasi kepada pengguna layanan

Tindakan yang telah dilaksanakan

Pembinaan rutin ke KPKNL dan pengguna layanan baik melalui surat maupun virtual

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan edukasi kepada pemangku kepentingan baik melalui surat, media sosial maupun workshop tertentu.
2. Melakukan bimbingan teknis baik melalui surat, workshop ataupun sosialisasi atau meeting/rapat lainnya dalam pengelolaan kekayaan negara kepada KPKNL.
3. Meminta masukan kepada KPKNL atas edukasi maupun komunikasi yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kinerja KPKNL

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian IKU

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Target	Realisasi
2021	90,00	94,07
2020	89,00	95,12

7. Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Tabel 3.23
SS Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			108,19%
	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	96,29%	113,28%
	7b-CP Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	97%	100,00%	103,09%

a. (7a-CP) Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara

Isu Utama

1. Target tindak lanjut pengelolaan aset tahun 2021 adalah sebesar 85%
2. Terhadap persetujuan yang telah diterbitkan, Satuan Kerja telah melakukan tindak lanjut persetujuan namun belum melakukan input persetujuan dan progres ke dalam aplikasi SIMAN

Implikasi

Pelaksanaan tindak lanjut oleh Satuan Kerja tidak terpantau

Akar Masalah

1. Aplikasi SIMAN belum update
2. Jumlah Satker yang cukup banyak di wilayah kerja Kanwil DJKN Balinusra dan setiap Satker memiliki karakteristik pengelolaan BMN yang berbeda
3. Kesadaran Satker yang kurang dalam menindaklanjuti surat persetujuan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Kanwil DJKN Balinusra telah berkoordinasi dan memintakan secara langsung baik melalui surat maupun secara informal kepada Satuan Kerja untuk dapat menyampaikan laporan.
2. Terhadap persetujuan pengelolaan yang belum diinput dalam aplikasi SIMAN, Kanwil telah melakukan hal tersebut dengan bantuan rekan-rekan yang melaksanakan On Job Training

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang telah diterbitkan oleh Kanwil DJKN Balinusra.
2. Melakukan koordinasi dengan satker atas tindak lanjut surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh Kanwil DJKN Balinusra

3. Memonitor aplikasi SIMAN secara berkala untuk memastikan surat persetujuan pengelolaan BMN telah tuntas ditindaklanjuti. Apabila belum selesai ditindaklanjuti, diberikan surat peringatan.
4. Mengevaluasi persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset.

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian IKU

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	Target	Realisasi
2021	85%	96,29%
2020	80%	97,13%

b. (7b-CP) Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti Isu Utama

Target tahun 2021 berasal dari KPKNL se wilayah kerja Kanwil DJKN Balinusra

Implikasi

Tindak lanjut atas rekomendasi harus terus dipantau dan dievaluasi melalui aplikasi teamcentral mengingat target ada di unit KPKNL

Akar Masalah

Aplikasi TeamCentral yang tidak user friendly

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi temuan secara rutin melalui aplikasi teamcentral
2. Berkoordinasi dengan Itjen, KPKNL

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Membuat jadwal penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi Pengawasan
2. Melakukan monitoring progres penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Tabel 3.25
Perbandingan Capaian IKU

Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	Target	Realisasi
2021	97%	100,00%
2020	90%	100%

8. Sasaran Strategis : SDM yang Kompeten

Tabel 3.26
SS SDM yang Kompeten

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
8	SDM yang Kompeten			120%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%

(8a – N) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Isu Utama

1. Untuk Tahun 2021 evaluasi pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai dilakukan untuk pegawai dengan Jabatan Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Pelaksana
2. Capaian terdiri dari Capaian Utama dan Capaian Tambahan. Capaian Utama merupakan terdiri dari pegawai (Pejabat Pengawas dan Pelaksana yang telah memenuhi kriteria 24 Jamlat, pelatihan sesuai tusi dan memenuhi usulan Kanwil (usulan training di Kanwil pada aplikasi e-performance) dengan pembobotan 100%, sedangkan capaian tambahan adalah merupakan jumlah pegawai yang melebihi 24 Jamlat dan memenuhi usulan Kanwil (usulan training) dengan pembobotan 20%.

Implikasi

Sampai dengan bulan Desember 2021 **42** pegawai telah mengikuti pelatihan melebihi 24 Jamlat dan memenuhi usulan Kanwil (usulan training) dari jumlah target pegawai sebanyak **42** orang

Akar Masalah

1. Beban kerja yang cukup tinggi serta adanya Work From Home (WFH) menyebabkan beberapa pegawai kesulitan untuk mengikuti e-learning yang telah dijadwalkan.
2. Masih ada beberapa usulan pelatihan yang telah disampaikan ke Kantor Pusat DJKN, namun belum disetujui walaupun pelatihan dimaksud dilakukan dengan metode e-learning.
3. Masih ada beberapa pegawai yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi tetapi belum melaporkan melalui

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan himbauan kepada para pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ditawarkan, dalam hal ini e-learning yang diselenggarakan oleh DJKN bekerja sama dengan BPPK ataupun Lembaga yang lain.
2. Melakukan Monitoring terhadap pelatihan (e-learning) yang telah dijadwalkan serta mendorong pegawai mengikuti e-learning dimaksud sesuai jadwalnya maupun pegawai yang belum mengikutinya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan bimbingan dan pemberian motivasi kepada para pegawai untuk tetap mengikuti pelatihan-pelatihan yang ditawarkan dan dijadwalkan walaupun tidak sesuai dengan tusinya.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat untuk memberikan kesempatan kepada para pegawai yang berminat mengikuti pelatihan.

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian IKU

Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Target	Realisasi
2021	100%	120%
2020	100%	120%

9. Sasaran Strategis : Organisasi yang Fit for Purpose

Tabel 3.28
SS Organisasi yang Fit for Purpose

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
9	Organisasi yang fit for purpose			120%
9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM	75	95,41	120%
9b-N	Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja	75	93,54	120%

a. (9a-N) Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM

Isu Utama

Pembangunan ZI WBK melibatkan seluruh pegawai Kanwil DJKN Balinusra baik ASN maupun Non ASN

Implikasi

Seluruh pegawai Kanwil DJKN Balinusra terlibat dalam seluruh kegiatan dan bertanggung jawab atas pembangunan ZI WBK

Akar Masalah

Aplikasi survei dari Kemenpan RB yang sempat mengalami masalah saat proses survei ke responden sedang dilaksanakan

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pembangunan WBK
2. Menjalin intimasi dengan responden

Rekomendasi Rencana Aksi

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama pembangunan ZI WBK tahun 2021 harus terus dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik

b. (9b-N) Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja Isu Utama

Reviu Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan kontrak kinerja, edukasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi

Implikasi

Semua pelaksanaan pengelolaan kinerja di Kanwil DJKN Balinusra harus di dokumentasikan dengan baik

Akar Masalah

Kesadaran yang kurang dari pegawai untuk mengelola kinerja dengan baik karena pencapaian IKU ini memerlukan koordinasi dan kerjasama dari semua pegawai

Tindakan yang telah dilaksanakan

Dokumentasi dilaksanakan secara lengkap dan di file tersendiri

Rekomendasi Rencana Aksi

Dokumen pengelolaan Kinerja tahun 2021 harus semuanya dibuat dan disampaikan tepat waktu

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian IKU

Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja	Target	Realisasi
2021	75	93,54
2020	70	95,64

10. Sasaran Strategis : Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Tabel 3.30
SS Pengelolaan Keuangan yang Optimal

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			100,26%
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,05%	95,75%	100,26%

(10a – CP) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Isu Utama

1. Keterlambatan Penyelesaian Tagihan SPM
2. Keterlambatan Pertanggungjawaban UP dan TUP
3. Penyerapan Anggaran pada Kanwil DJKN Balinusra sudah optimal

Implikasi

Capaian s.d. Triwulan IV hijau

Akar Masalah

1. Keterlambatan Penyelesaian Tagihan SPM.
2. Keterlambatan Pertanggungjawaban UP dan TUP
3. Wabah Covid-19 yang menyebabkan terganggunya operasional Penyerapan anggaran menjadi kurang optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah dilakukan penyampaian nota dinas ke bidang-bidang terkait identifikasi optimalisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Juni 2021.
2. Telah dilakukan penyampaian nota dinas ke bidang-bidang terkait anggaran yang kemungkinan tidak terpakai dan digunakan untuk refocusing anggaran.
3. Telah dilakukan Revisi kewenangan DJA terkait Pergeseran Dana tidak terpakai pada Bidang Teknis ke Umum untuk dapat direalisasikan.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan pergeseran anggaran melalui mekanisme kewenangan KPA atau Kanwil DJPb atau DJA

Tabel 3.31
Perbandingan Capaian IKU

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Target	Realisasi
2021	95,05%	95,75%
2020	95%	98,68%

B. Inisiatif Strategis

Pada tahun 2021 Kanwil DJKN Balinusra menetapkan 1 (satu) Inisiatif Strategis (IS) yaitu :

IKU : Pengelolaan kekayaan negara yang optimal/ Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

IS : Optimalisasi BMN (KOIN)

Konsep besarnya adalah Ekosistem bisnis di daerah yang mampu menstimulus perekonomian daerah melalui sektor ekspor sehingga terjadi sinergi antara Kanwil DJKN Balinusra, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, KPBC TMP A Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Obyek Optimalisasi :

1. Aset Properti Eks kelolaan PT. PPA yang berlokasi di Jl. Untung Suropati No. 14, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

a. Rencana Proyek Optimalisasi

Objek optimalisasi aset adalah Aset Properti Eks kelolaan PT. PPA yang berlokasi di Jalan Untung Surapati No, 14, Klungkung, dengan luas tanah sebesar 400 m² dan luas bangunan 492 m² dengan skema Pemanfaatan melalui Pinjam Pakai dengan jangka waktu 5 tahun. Objek tersebut nantinya akan digunakan sebagai Sekretariat Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekrasnada), Pusat Pelatihan dan Galeri UMKM Kabupaten Klungkung.

b. Progres Kegiatan

Program optimalisasi telah dilaksanakan pinjam pakai sejak tahun 2020. Sedangkan keberlangsungan kegiatan dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi pembangunan fisik gedung bangunan objek optimalisasi dan esensi kegiatan untuk menggerakkan UMKM agar dapat melaksanakan ekspor secara mandiri.

- Dari sisi fisik gedung dapat disampaikan sebagai berikut bahwa berdasarkan uji kelayakan fisik dari Dinas PU Kabupaten Klungkung dan citivas akademika Tehnik Sipil Udayana bahwa objek optimalisasi dibangun tahun 1987 tidak pernah mengalami renovasi sehingga bangunan mengalami lelah konstruksi dan ditemukan banyak retak dan pecah pada bagian konstruksi bangunan. Sehingga bangunan tidak layak untuk dipergunakan.
- Sebagai bentuk keseriusan Pemkab Klungkung untuk merenovasi bangunan objek optimalisasi telah terbitnya DIPA tahun 2021 untuk pembangunan gedung baru senilai Rp. 2 M
- Sedangkan untuk esensi pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan kegiatan *Coaching Program for New Exporter (CPNE)* oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kegiatan CPNE dilakukan baik secara *online* maupun *offline* dan juga telah dilaksanakan kegiatan Ekspor itu mudah oleh KPP BC Denpasar dan sosialisasi Lelang UMKM oleh KPKNL Denpasar.
- Selain itu dalam pemberdayaan UMKM, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara menginisiasi lahirnya Desa Devisa Uyah Kusamba. Desa Devisa adalah Desa yang berbasis community Development dimana terdapat produk unggulan dari kelompok masyarakat yakni petani garam dengan menghasilkan garam yang nantinya garam tersebut akan diekspor.

c. Kendala/Akar Masalah

Adanya Pandemi membuat program optimalisasi asset tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan. Yakni pembangunan gedung menjadi terlambat. Hal ini karena adanya pandemi sehingga penerimaan utama dari Pemkab Klungkung yang berasal dari sector pariwisata menjadi sangat terpengaruh dan turun drastis. Penurunan pendapatan ini menyebabkan Pemkab Klungkung harus memilih dan memilah dalam pembelanjaan APBD nya, sehingga DIPA pembangunan gedung dekrasnada mengalami refocusing dan tidak dapat dibangun pada tahun 2021.

Meskipun demikian kegiatan pemberdayaan UMKM sebagai esensi dari kegiatan optimalisasi asset ini tetap berjalan dan berlangsung dan memunculkan UMKM baru yang siap ekspor dan terciptanya Desa Devisa Uyah Kusamba

d. Output

Output dari kegiatan ini dapat dilihat dari 2 aspek, yakni

A. Dari sisi fisik gedung

Dengan program optimalisasi asset ini, DJKN tidak perlu mengeluarkan biaya untuk waker dan pihak Pemda Klungkung juga dapat menghemat biaya untuk sewa Gedung atau Kantor Dekranasda

B. Dari sisi esensi Kegiatan

▪ Terciptanya Desa Devisa Uyah Kusamba

Pada akhir Bulan Oktober 2021 Desa Devisa Uyah Kusamba ditetapkan menjadi desa Devisa. Ini merupakan Desa Devisa yang kelima di Indonesia dari sekitar 72 ribuan desa yang ada di Indonesia. Ditargetkan pada triwulan pertama tahun 2022, Desa Devisa Uyah Kusamba akan melakukan ekspor perdana ke negeri Belanda. Dengan didampingi LPEI, para petani uyah kusamba diberikan pelatihan *seasalt* untuk diversifikasi produuk mereka, pendampingan ini dilakukan oleh Chef Ragil

▪ Lahirnya UMKM Baru yang siap Ekspor

Selama ini UMKM di Kabupaten Klungkung telah melakukan ekspor dengan menggunakan jasa trader. Dengan adanya pelatihan CPNE dan Ekspor itu mudah maka para UMKM diharapkan dapat melakukan ekspor secara mandiri. Adapun untuk UMKM yang sudah melakukan ekspor, maka LPEI siap membantu untuk membuka pasar ekspor yang baru.

C. Realisasi Anggaran

DIPA Kanwil DJKN Balinusra tahun anggaran 2021 adalah sebesar LaRp.2.085.237.000,- dan realisasi DIPA untuk semua jenis belanja sebesar Rp2.015.594.590,- sehingga saldo Rp.69.642.410,- dan telah disetor Kembali ke kas Negara.

Isu utama dalam kualitas anggaran ini adalah adanya peraturan dari Ditjen Perbendaharaan nomor : Per- 4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2021 berisi tentang pengaturan IKPA ReAktivasi dimana beberapa dari 13 indikator IKPA tidak dilakukan penilaian (exp.Revisi DIPA dan Deviasi Hal. III DIPA), masih terdapat saldo yang cukup banyak apda triwulan IV tahun 2021, sedangkan salah satu komponen perhitungan IKPA ReAktuivasi adalah

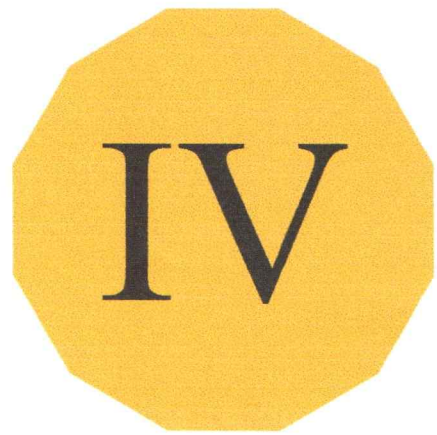
Penyerapan Anggaran, kemudian perhitungan IKU PKPA pada triwulan IV menggunakan komposisi IKPA ReAktivasi (60%) dan SMART DJA (40%).

Adapun kendala dalam pencapaian IKU adalah :

- a. Terkait saldo yang menumpuk di Triwulan IV disebabkan oleh faktor Pandemi Covid-19 dan Managemen Perencanaan Kerja/Kegiatan yang terkait dengan anggaran yang tersedia di DIPA;
- b. Terakit dengan Aplikasi OM-SPAN dan SMART-DJA, kewenangan berada pada DJPb dan DJA.

Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan Revisi Kewenangan KPA demi terlaksanakannya penyerapan Anggaran yang optimal;
2. Berkoordinasi secara intensif dengan KPKNL Denpasar, Singarja, Mataram, Bima, Kupang dan Bagian Keuangan KP DJKN terkait aplikasi OM-SPAN dan SMART-DJA.
3. Bersinergi yang efektif terkait Capaian Output bidang teknis dengan bagian umum, sehingga penginputan capaian output pada aplikasi Sakti dapat dilaksanakan lebih cepat.
4. Untuk pelaksanaan Anggaran telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (korwas secara rutin setiap awal bulan.



PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kanwil DJKN Balinusra Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau Sasaran Strategis Tahun 2021. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Kantor Wilayah Kanwil DJKN Balinusra yang dilakukan dalam Tahun 2021 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan telah selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Guna mengimplementasikan optimalisasi tercapainya kinerja maka peran Kanwil DJKN Balinusra dalam membangun citra baik bagi *stakeholders* sangat diharapkan.

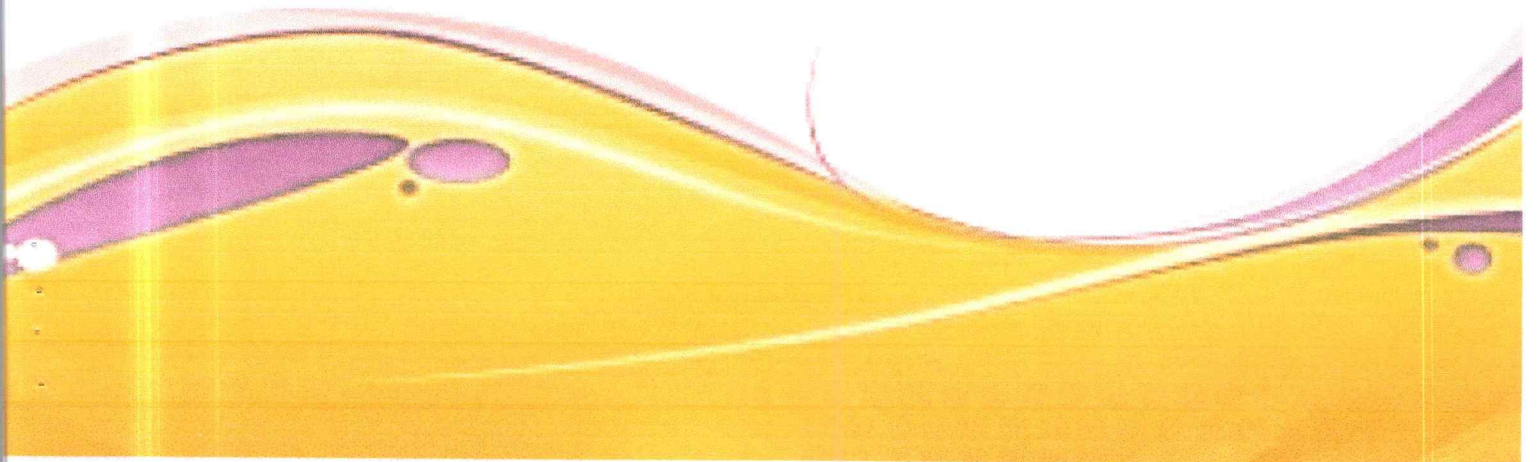
Dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusatenggara menggunakan Pengukuran kinerja dalam *BSC* merupakan penilaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJKN. Sesuai dengan Peta Strategis DJKN Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebanyak 10 (dua belas) SS dan dijabarkan kedalam 20 IKU sebagaimana yang telah tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Balinusra Tahun 2021, capaian kinerja setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan pendekatan *BSC*, mendapatkan rata-rata tingkat pencapaian kinerja sebesar 112,52 % sesuai tabel sebagai berikut :

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
PERIODE TRIWULAN IV 2021
TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							29,43%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							117,74%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	79,59%	19%	40%	128,371%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	133,77%	14%	30%	133,77%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan nilai outstanding piutang negara (Saldo PND5 s.d 2017)	P/M	100%	112,41%	14%	30%	112,41%	112,41%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,31%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							116,64%	
2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	P/H	88,00	98,88	11%	44%	112,37%	112,37%	hijau
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	162,34%	14%	56%	162,34%	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							100,85%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4,68	4,72	21%	100%	100,85%	100,85%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							32,75%	
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							110,31%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	103,30%	19%	43%	103,30%	103,30%	hijau
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	110,09%	11%	25%	110,09%	110,09%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	4,91%	14%	32%	177,69%	120,00%	hijau
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							113,63%	
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	P/M	100%	107,03%	14%	25%	107,03%	107,03%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35%	48,94%	14%	25%	139,82%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-convent	P/M	92%	98,90%	14%	25%	107,50%	107,50%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	P/M	12,5%	3,00%	14%	25%	176,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							104,52%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90,00	94,07	14%	100%	104,52%	104,52%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							108,19%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaankekayaan negara	P/M	85%	96,29%	14%	50%	113,28%	113,28%	hijau
7b-CP	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M	97%	100,00%	14%	50%	103,09%	103,09%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34,03%	
8	SDM yang Kompeten							120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120,00%	
9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WDK/WBBM	P/M	75	95,41	14%	50%	127,21%	120,00%	hijau
9b-N	Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja	P/M	75	93,54	14%	50%	124,72%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							100,26%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,75%	14%	100%	100,26%	100,26%	hijau
10b-N	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti	P/M							abu-abu
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								112,52%	hijau

Capaian kinerja yang tertuang dalam Lakin harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, dan juga harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya Kanwil dan KPKNL dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat melalui pemberian pelayanan yang lebih optimal.

LAMPIRAN 1





**KONTRAK KINERJA
NOMOR 26/KN/2021**

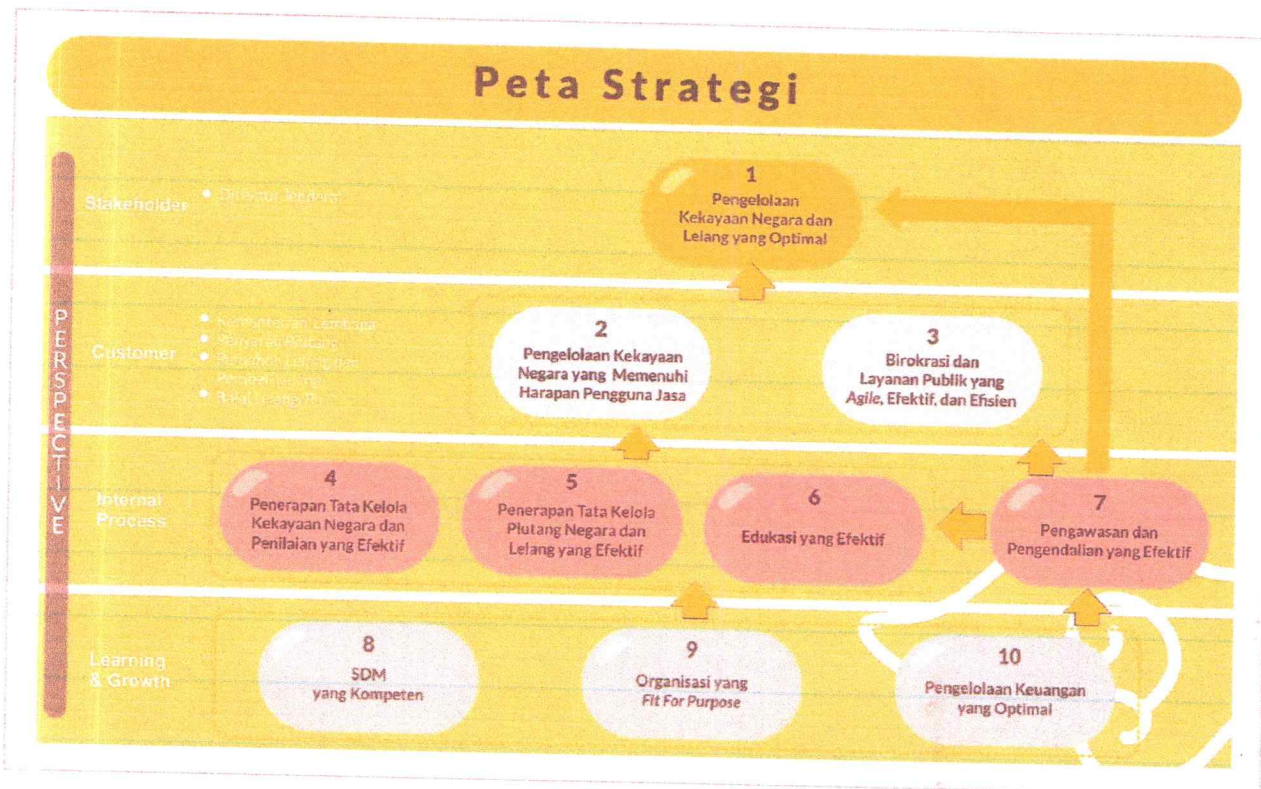
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara

saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-N Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.68
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-N Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
		7b-N Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	97%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

4

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 1,483,988,000,00
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 137,472,000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 17,776,000,00
3. Pengelolaan Aset	Rp 1,328,740,000,00
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	
Dukungan Manajemen	Rp 1,450,159,000,00
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 15,912,000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1,380,115,000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 23,268,000,00
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 30,864,000,00
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Isa Rachmatarwata

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa
Tenggara

Anugrah Komara

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88	88	88	88	88	88	88
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	-	-	-	-	4.68	4.68
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
5c-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
5d-N	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	90	90	-	90	90	90
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
7b-N	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	97%	97%
8	SDM yang Kompeten							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9	Organisasi yang Fit For Purpose							

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	-	-	-	-	75	75
9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Jakarta, Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali
dan Nusa Tenggara,

Anugrah Komara

Sasaran Kerja Pegawai

I. PEJABAT PENILAI			II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
No			No		
1	Nama	Isa Rachmatarwata	1	Nama	Anugrah Komara
2	NIP	196612301991021001	2	NIP	19621125 198310 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama / IV.e	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IV.d
4	Jabatan	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 bulan	-
3	Menurunkan Nilai Outstanding Piutang Negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Mewujudka Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	88	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	4.68	100	12 bulan	-
7	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	12 bulan	-
8	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan Produktivitas Lelang	-	35%	100	12 bulan	-
12	Melaksanakan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	90	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan aset	-	85%	100	12 bulan	-
16	Menindaklanjuti Rekomendasi hasil pengawasan	-	97%	100	12 bulan	-
17	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
18	Mewujudkan Nilai Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	75	100	12 bulan	-
19	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	75	100	12 bulan	-
20	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	12 bulan	-

Jakarta, Januari 2021

Pejabat Penilai,

PNS yang Dinilai,

Isa Rachmatarwata
NIP 19661230 199102 1 001

Anugrah Komara
NIP 19621125 198310 1 001

INISIATIF STRATEGIS
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Optimalisasi BMN (KOIN)	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	12 Bulan	Tim Kanwil DJKN beranggotakan 5 orang pejabat/ pelaksana	

Jakarta, Januari 2021
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Bali dan Nusa Tenggara,

Anugrah Komara

DATA CAPAIAN KINERJA
KANTOR WILAYAH DJKRI BALI DAN NUSA TENGGARA
TRIMULANIV
TAHUN 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			TARGET 2021		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d Q3	Q4	2021	
1			Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	MAKVTIK								
1a-CP	P/M	Tingkat Kesuksesan Penggunaan BUMN dengan SSXK	62%									
		TARGET/Realisasi Penggunaan BUMN dengan SSXK	62%									
		Moldev KPNL	62%	0%	72%	77,23%	80%	81,21	81,21%	79,59%	79,59%	
		KPNL Denpasar	62%	0%	72%	77,23%	80%	81,21	81,21%	79,59%	79,59%	
		KPNL Singaraja	62%	0%	72%	77,23%	80%	81,21	81,21%	79,59%	79,59%	
		KPNL Mataram	62%	0%	72%	77,23%	80%	81,21	81,21%	79,59%	79,59%	
		KPNL Bima	62%	0%	72%	77,23%	80%	81,21	81,21%	79,59%	79,59%	
		KPNL Kupang	62%	0%	72%	77,23%	80%	81,21	81,21%	79,59%	79,59%	
		Capaian KLU	62%	0,00%	77,23%	77,23%	79,59%	82,71	82,71%	79,59%	79,59%	
1b-CP	P/M	Persentase Pemerintah Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	MAX/TIK									
		TARGET/Realisasi PMPB BUMN	25.010.000,000		2.790.340.292	15.021.518.103	18.021.518.103	20.624.034.797	20.624.034.797	31.729.045.776	31.729.045.776	
		KPNL Denpasar	Rp 9.210.000,000	Rp 1.598.339.467	Rp 6.182.982.270	Rp 6.382.982.270	Rp 8.452.019.245	Rp 8.452.019.245	Rp 12.023.921.030	Rp 12.023.921.030		
		KPNL Singaraja	Rp 2.700.000,000	Rp 373.573.603	Rp 1.164.980.831	Rp 1.364.980.831	Rp 1.592.698.638	Rp 1.592.698.638	Rp 2.298.861.575	Rp 2.298.861.575		
		KPNL Mataram	Rp 5.000.000,000	Rp 981.088.640	Rp 2.051.294.570	Rp 2.051.294.570	Rp 4.302.873.732	Rp 4.302.873.732	Rp 6.433.662.271	Rp 6.433.662.271		
		KPNL Bima	Rp 2.500.000,000	Rp 235.360.408	Rp 451.389.174	Rp 451.389.174	Rp 1.328.284.583	Rp 1.328.284.583	Rp 2.758.729.345	Rp 2.758.729.345		
		KPNL Kupang	Rp 5.600.000,000	Rp 451.389.174	Rp 4.377.949.453	Rp 4.377.949.453	Rp 4.850.378.569	Rp 4.850.378.569	Rp 8.215.200.555	Rp 8.215.200.555		
		TARGET/Realisasi PMPB Pulaan Negara	Rp 328.500,000	Rp 1.424.999.622	Rp 286.357.551	Rp 286.357.551	Rp 302.152.094	Rp 302.152.094	Rp 362.152.054	Rp 362.152.054		
		KPNL Denpasar	Rp 250.000,000	Rp 1.424.910.839	Rp 275.502.280	Rp 275.502.280	Rp 299.831.377	Rp 299.831.377	Rp 309.870.594	Rp 309.870.594		
		KPNL Singaraja	Rp 40.000,000	Rp 11.042.682	Rp 8.221.499	Rp 8.221.499	Rp 8.221.499	Rp 8.221.499	Rp 10.701.487,00	Rp 10.701.487,00		
		KPNL Mataram	Rp 10.000,000	Rp 4.871.699	Rp 8.221.499	Rp 8.221.499	Rp 8.221.499	Rp 8.221.499	Rp 10.517.209,00	Rp 10.517.209,00		
		KPNL Bima	Rp 10.500,000	Rp 1.808.305	Rp 10.027.306	Rp 10.027.306	Rp 10.027.306	Rp 10.027.306	Rp 10.027.306	Rp 10.027.306		
		KPNL Kupang	Rp 18.000,000	Rp 2.561.337	Rp 4.731.996	Rp 4.731.996	Rp 5.229.209	Rp 5.229.209	Rp 7.335.181,00	Rp 7.335.181,00		

		KPKN, Denpasar	10%	20%	3%	3,00%	-1,49%	3,00%	13,31%	95,60	13,31%	94,07
		KPKN, Singaja	10%	0%	3%	3,00%	-1,58%	3,00%	0,00%	96,08	0,00%	96,08
		KPKN, Mataram	10%	0%	0%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00%	96,82	0,00%	96,82
		KPKN, Bima	10%	0%	0%	-0,83%	-0,83%	0,00%	0,00%	96,53	0,00%	96,53
		KPKN, Kupang	15%	0%	0%	-0,97%	-0,97%	0,00%	0,00%	95,00	0,00%	95,00
		Desain PIRIP Pungung Negara	15%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,00	0,00%	95,00
		KPKN, Denpasar	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95,00	0%	95,00
		KPKN, Singaja	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95,00	0%	95,00
		KPKN, Mataram	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95,00	0%	95,00
		KPKN, Bima	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95,00	0%	95,00
		KPKN, Kupang	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95,00	0%	95,00
		Capaian IKU	12,5%	1,99%	0,60%	#VALUE!	-0,47%	1,03%	1,35%	93,14	1,35%	94,07
6		Edukasi yang efektif										
	P/M	Target: Tinggal sedikitnya 50% dari jumlah	MAX/AVERAGE									
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara	90		93,00	93,00		93,00		93,00		94,07
		Dua Unit Kegiatan Monev Kami/DN Pada Tap: KPKN (Tidak Masuk Hitungan IKU)										
		KPKN, Denpasar	92							95,60		
		KPKN, Singaja	90							96,72		
		KPKN, Mataram	96							96,82		
		KPKN, Bima	85							96,53		
		KPKN, Kupang	80							95,00		
		CAPAIAN IKU			93,00	93,00		93,00		95,14		94,07
7		Perawatan dan pengendalian yang efektif										
	P/M	Perawatan tidak lanjut sesuai jadwal/kelembagaan negara	MAX/TIX									
		Jumlah perseruan/penerimaan pengisian BHM periode semester II 2020 yang ditandatangani oleh K/L			179	179		179		186		186
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara			0	0		0		78		78
		KPKN, Denpasar			78	78		78		21		21
		KPKN, Singaja			21	21		21		42		42
		KPKN, Mataram			42	42		42		28		28
		KPKN, Bima			28	28		28		10		10
		KPKN, Kupang			10	10		10		69		69
		Jumlah perseruan/penerimaan pengisian BHM yang diterbitkan pengelolah barang ditandatangani oleh K/L			69	69		69		10		10
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara			0	0		0		10		10
		KPKN, Denpasar			11	11		11		20		20
		KPKN, Singaja			20	20		20		13		13
		KPKN, Mataram			13	13		13		15		15
		KPKN, Bima			15	15		15		194		194
		KPKN, Kupang			194	194		194		83		83
		Jumlah perseruan/penerimaan pengisian BHM yang diterbitkan pengelolah barang periode semester II 2020			83	83		83		23		23
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara			0	0		0		42		42
		KPKN, Denpasar			23	23		23		28		28
		KPKN, Singaja			42	42		42		18		18
		KPKN, Mataram			28	28		28		185		185
		KPKN, Bima			18	18		18		1		1
		KPKN, Kupang			185	185		185		69		69
		Jumlah perseruan/penerimaan pengisian BHM yang diterbitkan pengelolah barang periode semester 2021			1	1		1		14		14
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara			69	69		69		22		22
		KPKN, Denpasar			14	14		14		20		20
		KPKN, Singaja			20	20		20		59		59
		KPKN, Mataram			20	20		20		63,44%		63,44%
		KPKN, Bima			59	59		59		65,44%		65,44%
		KPKN, Kupang			63,44%	63,44%		63,44%		65,44%		65,44%
		Target/Realisasi			89%	89%		89%		65,44%		65,44%
		Capaian IKU			MAX/TIX	MAX/TIX		MAX/TIX		100,00%		100,00%
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara			97%	97%		97%		100,00%		100,00%
		KPKN, Denpasar			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Singaja			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Mataram			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Bima			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Kupang			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		Target/Realisasi			89%	89%		89%		100,00%		100,00%
		Capaian IKU			MAX/TIX	MAX/TIX		MAX/TIX		100,00%		100,00%
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara			97%	97%		97%		100,00%		100,00%
		KPKN, Denpasar			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Singaja			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Mataram			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Bima			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Kupang			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		Target/Realisasi			89%	89%		89%		100,00%		100,00%
		Capaian IKU			MAX/TIX	MAX/TIX		MAX/TIX		100,00%		100,00%
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara			97%	97%		97%		100,00%		100,00%
		KPKN, Denpasar			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Singaja			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Mataram			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Bima			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Kupang			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		Target/Realisasi			89%	89%		89%		100,00%		100,00%
		Capaian IKU			MAX/TIX	MAX/TIX		MAX/TIX		100,00%		100,00%
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara			97%	97%		97%		100,00%		100,00%
		KPKN, Denpasar			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Singaja			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Mataram			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Bima			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Kupang			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		Target/Realisasi			89%	89%		89%		100,00%		100,00%
		Capaian IKU			MAX/TIX	MAX/TIX		MAX/TIX		100,00%		100,00%
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara			97%	97%		97%		100,00%		100,00%
		KPKN, Denpasar			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Singaja			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Mataram			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Bima			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Kupang			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		Target/Realisasi			89%	89%		89%		100,00%		100,00%
		Capaian IKU			MAX/TIX	MAX/TIX		MAX/TIX		100,00%		100,00%
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara			97%	97%		97%		100,00%		100,00%
		KPKN, Denpasar			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Singaja			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Mataram			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Bima			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Kupang			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		Target/Realisasi			89%	89%		89%		100,00%		100,00%
		Capaian IKU			MAX/TIX	MAX/TIX		MAX/TIX		100,00%		100,00%
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara			97%	97%		97%		100,00%		100,00%
		KPKN, Denpasar			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Singaja			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Mataram			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Bima			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Kupang			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		Target/Realisasi			89%	89%		89%		100,00%		100,00%
		Capaian IKU			MAX/TIX	MAX/TIX		MAX/TIX		100,00%		100,00%
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara			97%	97%		97%		100,00%		100,00%
		KPKN, Denpasar			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Singaja			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Mataram			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Bima			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Kupang			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		Target/Realisasi			89%	89%		89%		100,00%		100,00%
		Capaian IKU			MAX/TIX	MAX/TIX		MAX/TIX		100,00%		100,00%
		Kami/DN Bali dan Nusa Tenggara			97%	97%		97%		100,00%		100,00%
		KPKN, Denpasar			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Singaja			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Mataram			N/A	N/A		N/A		100,00%		100,00%
		KPKN, Bima			N/A	N						

b	Jumlah kawasan yang telah melebihi kriteria	11	30	30	30	31	31	44	44	44	110,00%
c	Jumlah kawasan total	11	30	30	30	31	31	44	44	44	110,00%
	Kemudi DUKK Bali dan Nusa Tenggara	47	45	45	45	44	44	44	44	44	100,00%
	% Capaian Utama	47	66,67%	66,67%	66,67%	70,45%	70,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	% Capaian Tambahan	23,40%	66,67%	66,67%	66,67%	70,45%	70,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Capaian IKU	28,09%	80,00%	80,00%	80,00%	84,55%	84,55%	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%
	Monorv iKU Pengembangan Pegawai di KPML										
	KPKML Denpasar	27,94%	50,00%	50,00%	50,00%	80%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	KPKML Singaperbangsa	37,50%	50,00%	50,00%	50,00%	88%	88,28%	97,05%	97,05%	100,00%	100,00%
	KPKML Mataram	20,00%	56,47%	56,47%	56,47%	105%	105,88%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	KPKML Bima	17,78%	47,14%	47,14%	47,14%	103%	102,23%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	KPKML Kupang	31,76%	66,21%	66,21%	66,21%	101%	101,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Organisasi yang tidak terdapat										

**LEMBAR PENETAPAN
PERUBAHAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bersama ini ditetapkan kembali manual IKU Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk periode Kontrak Kinerja 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 yang mengalami perubahan pada manual IKU:

a. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)

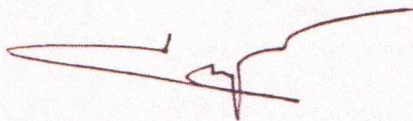
Raw Data sebelumnya	Menjadi
PNBP BMN Rp25.010.000.000	PNBP BMN Rp25.010.000.000
PNBP Piutang Negara Rp207.000.000	PNBP Piutang Negara Rp328.050.000
PNBP Lelang Rp35.448.000.000	PNBP Lelang Rp35.448.000.000

b. Penurunan Outstanding Piutang Negara

Raw Data sebelumnya	Menjadi
Rp7.700.000.000	Rp9.110.000.000

Denpasar, 30 Juli 2021

Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum,
Dan Informasi,



C. Chrisnan Soegihprajoko *sfu*
19700312 199603 100 1

Kepala Kanwil DJKN Bali dan
Nusa Tenggara,



sfu Anugrah Komara
19621125 198310 100 1

LAMPIRAN

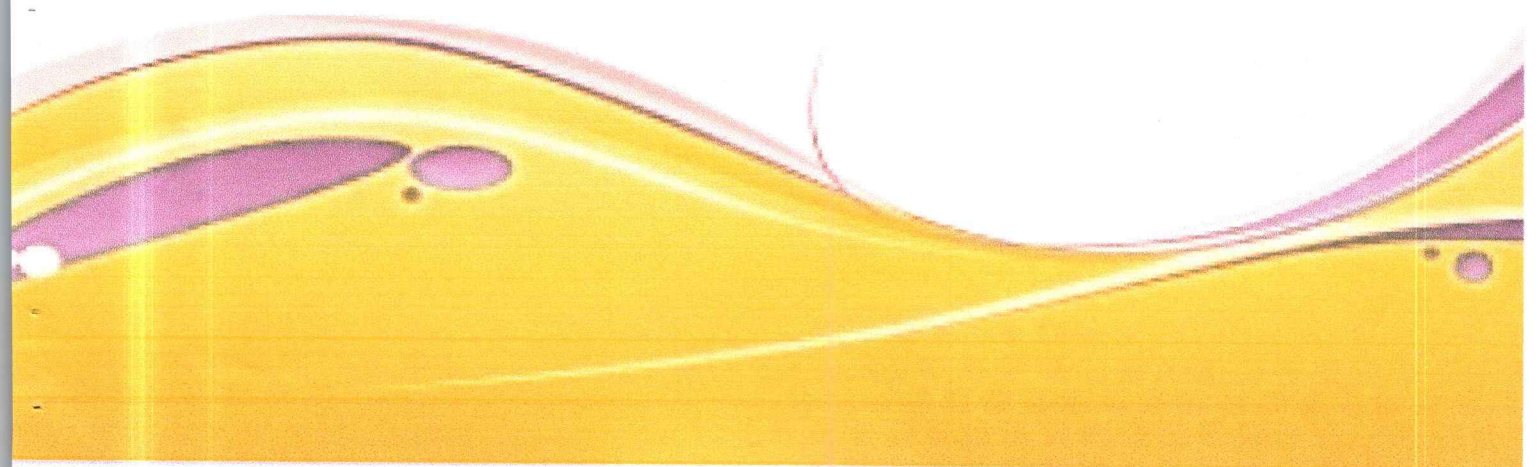
Lembar Penetapan Perubahan
Manual IKU

Perubahan manual IKU

Kode IKU	IKU	Sebelum	Menjadi
1b-CP	Persentase Penenmaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	a. PNBP BMN Rp25.010.000.000 b. PNBP Piutang Negara Rp207.000.000 c. PNBP Lelang Rp35.448.000.000	a. PNBP BMN Rp25.010.000.000 b. PNBP Piutang Negara Rp328.050.000 c. PNBP Lelang Rp35.448.000.000
1c-CP	Penurunan Outstanding Piutang Negara	a. Nilai <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp7.700.000.000 (raw data target)	a. Nilai <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp9.110.000.000 (raw data target)

✓-4.

LAMPIRAN 2



NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
PERIODE TRIWULAN IV 2021
TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							29,43%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							117,74%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	79,59%	19%	40%	128,371%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	133,77%	14%	30%	133,77%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan nilai outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	112,41%	14%	30%	112,41%	112,41%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,31%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							116,64%	
2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	P/H	88,00	98,88	11%	44%	112,37%	112,37%	hijau
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	162,34%	14%	56%	162,34%	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							100,85%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4,68	4,72	21%	100%	100,85%	100,85%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							32,75%	
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							110,31%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	103,30%	19%	43%	103,30%	103,30%	hijau
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	110,09%	11%	25%	110,09%	110,09%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	4,91%	14%	32%	177,69%	120,00%	hijau
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							113,63%	
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	P/M	100%	107,03%	14%	25%	107,03%	107,03%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35%	48,94%	14%	25%	139,82%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-convent	P/M	92%	98,90%	14%	25%	107,50%	107,50%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	P/M	12,5%	3,00%	14%	25%	176,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							104,52%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90,00	94,07	14%	100%	104,52%	104,52%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							108,19%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaankekayaan negara	P/M	85%	96,29%	14%	50%	113,28%	113,28%	hijau
7b-CP	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M	97%	100,00%	14%	50%	103,09%	103,09%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34,03%	
8	SDM yang Kompeten							120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120,00%	
9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBR/WBBM	P/M	75	95,41	14%	50%	127,21%	120,00%	hijau
9b-N	Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja	P/M	75	93,54	14%	50%	124,72%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							100,26%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,75%	14%	100%	100,26%	100,26%	hijau
10b-N	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti	P/M							abu-abu
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								112,52%	hijau

Mengetahui,
 Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Anugrah Komara
 NIP 196211251983101001

Kepala Bidang KIKI
 Selaku Sub Manajer Kinerja Organisasi

Constantinus Chrisnan Spogtherprajoko
 NIP 197003121996031001